

Analisis Isu Terkini **PROVINSI JAMBI** **2025**

Volume 6, 2025



Analisis Isu Terkini **PROVINSI JAMBI** **2025**

Volume 6, 2025

<https://jambi.bps.go.id>



Analisis Isu Terkini Provinsi Jambi 2025

Volume 6, 2025

Katalog: 9101009.15

Nomor Publikasi: 15000.25051

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xiv+37 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Sumber Ilustrasi:

freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

Tim Penyusun

Analisis Isu Terkini Provinsi Jambi 2025

Volume 6, 2025

Pengarah:

Agus Sudibyo

Penanggung Jawab:

Sumarmi

Penyunting:

Sumarmi

Penulis Naskah:

Rieko Nopriady • Lisa Gusmanita

Pengolah Data:

Rieko Nopriady • Sinta Bela • Fikri Septrian Anggara

Desain Kover dan Templat:

Bayu Dwi Kurniawan

Penata Letak:

Bayu Dwi Kurniawan

Dwi Wahyudi

<https://jambi.bps.go.id>

Kata Pengantar

Analisis Isu Terkini Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan analisis mendalam yang menyajikan gambaran dan fenomena yang terjadi di Provinsi Jambi. Analisis Isu Terkini membahas 2 (tema), yaitu tema pertanian dan tema sosial ekonomi.

Tema pertanian dengan judul Dinamika Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi menyajikan analisis hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) Provinsi Jambi Tahun 2024. Tema ini membahas tentang gambaran pengusahaan komoditas kelapa sawit terutama terkait potensi dan efisiensi usaha komoditas kelapa sawit dalam menyokong perekonomian petani kelapa sawit di Provinsi Jambi. Selain itu, digunakan juga data pendukung untuk memperdalam analisis.

Tema sosial ekonomi mengangkat judul Masa *Golden Age* sebagai Fondasi Terbentuknya Generasi Emas di Provinsi Jambi. Data yang digunakan bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 dan data pendukung lainnya terkait dengan pendidikan prasekolah di Provinsi Jambi. Tema ini membahas tentang partisipasi prasekolah penduduk usia 0-6 tahun di Provinsi Jambi serta program pemerintah daerah dalam meningkatkan angka tersebut. Selain itu juga dibahas tentang pengaruh karakteristik keluarga terhadap partisipasi prasekolah di Provinsi Jambi.

Ketersediaan publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna data, utamanya dalam perumusan kebijakan bidang pertanian dan pembangunan manusia, serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga Allah SWT, meridai upaya dalam berkontribusi membangun bangsa melalui penyediaan informasi dan analisis data.

Jambi, Desember 2025
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jambi



Agus Sudibyo

<https://jambi.bps.go.id>



Daftar Isi

Analisis Isu Terkini Provinsi Jambi 2025

Volume 6, 2025

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran.....	xiii
I Dinamika Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi.....	3
1.1 Peran Sektor Perkebunan dalam Perekonomian Provinsi Jambi	3
1.2 Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi	7
1.3 Struktur Ongkos dan Efisiensi Ekonomi Usaha Tani Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi	12
1.4 Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi	16
1.5 Kesimpulan dan Saran.....	18
1.6 Daftar Pustaka	19
1.7 <i>Technical Notes</i>	20
II Masa <i>Golden Age</i> sebagai Fondasi Terbentuknya Generasi Emas di Provinsi Jambi.....	23
2.1 Generasi Emas Lahir dari Sebuah Keluarga.....	25
2.1.1 Pendidikan Prasekolah dan Keluarga	25
2.1.2 Penelitian Empiris Terkait Pendidikan Prasekolah.....	26
2.2 Generasi Emas Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Jambi	27
2.2.1 Pendidikan Prasekolah di Provinsi Jambi	27
2.2.2 Akses Pendidikan Prasekolah di Provinsi Jambi	30
2.3 Menilik Harapan Membangun Generasi Emas	32
2.3.1 Upaya Pemerintah Meningkatkan Pendidikan Prasekolah.....	32
2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pendidikan Prasekolah dari Perspektif Keluarga	33
2.4 Kesimpulan dan Saran.....	34
2.5 Daftar Pustaka	35
2.6 Lampiran	36





<https://jambi.bps.go.id>





Daftar Tabel

Analisis Isu Terkini Provinsi Jambi 2025
Volume 6, 2025

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Jumlah Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota dan Unit Usaha di Provinsi Jambi (unit), 2023	7
1.2	Distribusi Pola Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (unit), 2023.....	9
1.3	Persentase Rata-rata Ongkos Usaha dari Total Pengeluaran Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Provinsi Jambi dan Indonesia, 2024	13
1.4	Perbandingan Komponen Biaya dan Isu Teknis Perkebunan Kelapa Sawit: Petani Jambi, Standar Nasional, dan Tren Global	14
1.5	Perbandingan Indikator Efisiensi Usaha Kelapa Sawit di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2024	15
1.6	Indikator Kesejahteraan Subjektif Petani Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi, 2024.....	16
1.7	Akses Kredit pada Petani Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi, 2024	17
1.8	Ketersediaan Bahan Input pada Petani Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi, 2024.....	18
2.1	Partisipasi Prasekolah Penduduk Usia 0–6 Tahun di Provinsi Jambi, 2024	29
2.2	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Pendidikan Prasekolah di Provinsi Jambi, Tahun Ajaran 2023/2024.....	31
2.3	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Pendidikan Prasekolah di Provinsi Jambi, Tahun Ajaran 2023/2024.....	32





<https://jambi.bps.go.id>





Daftar Gambar

Analisis Isu Terkini Provinsi Jambi 2025
Volume 6, 2025

Gambar	Judul	Halaman
1.1	Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Agustus 2024	3
1.2	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020–2024	4
1.3	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di Provinsi Jambi (persen), 2020–2024	4
1.4	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor di Provinsi Jambi (rumah tangga), 2013 dan 2023	5
1.5	Jumlah Pengusahaan Pertanian Menurut Unit Usaha dan Subsektor di Provinsi Jambi (unit), 2023	6
1.6	Perkembangan Nilai Ekspor Asal Provinsi Jambi Menurut Komoditi (US\$), 2020–2024	6
1.7	Distribusi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Perusahaan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2023.....	8
1.8	Distribusi Unit Usaha Yang Memanen dan Sistem Panen Risiko menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2023.....	10
1.9	Distribusi Sistem Panen Monokultur dan Tanaman Tidak Menghasilkan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2023	11
2.1	Piramida Penduduk Jambi, 2024.....	27
2.2	Penduduk Usia 0–6 tahun Berdasarkan Jenis Kelamin, 2024	28
2.3	Partisipasi Penduduk Usia 0–6 Tahun terhadap Pendidikan Prasekolah Berdasarkan Jenis Kelamin, 2024	29
2.4	Capaian APK PAUD Nasional dan Provinsi Jambi, 2020–2024.....	30





<https://jambi.bps.go.id>





Daftar Lampiran

Analisis Isu Terkini Provinsi Jambi 2025

Volume 6, 2025

Lampiran	Judul	Halaman
2.1	Variabel dan Definisi Operasional.....	36
2.2	Hasil Estimasi Model Regresi Logistik Biner.....	37

<https://jambi.bps.go.id>





<https://jambi.bps.go.id>



1

Dinamika Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi

“

Pertanian menjadi sektor utama yang menyerap tenaga kerja terbesar Provinsi Jambi. Selain itu, pertanian juga berperan penting dalam menopang perekonomian.

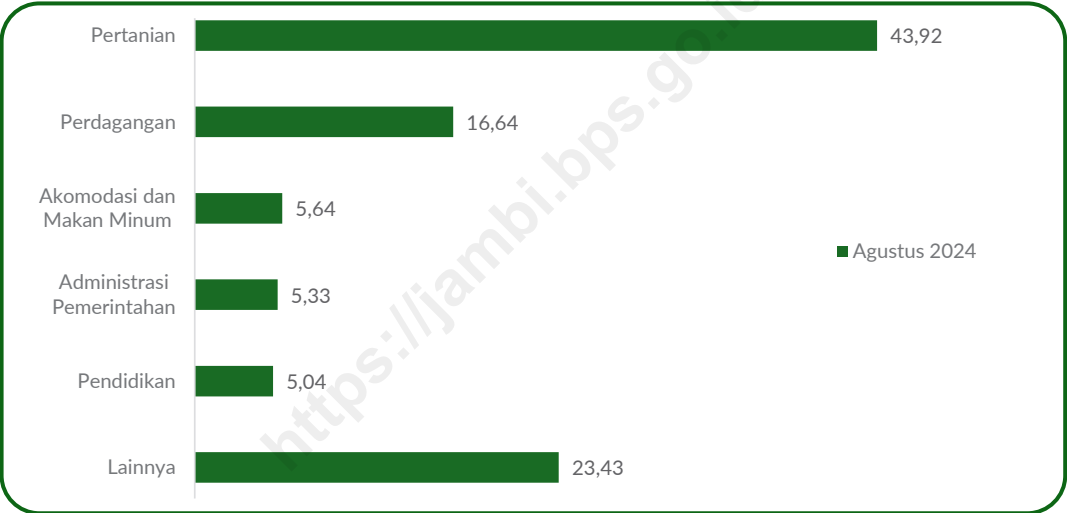
”

<https://jambi.bps.go.id>

Dinamika Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi

1.1 Peran Sektor Perkebunan dalam Perekonomian Provinsi Jambi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang merata antarwilayah, diperlukan pemahaman mendalam terhadap karakteristik serta dinamika perekonomian daerah. Di negara berkembang seperti Indonesia, sektor pertanian memegang peran strategis karena tidak hanya sebagai penyedia pangan, tetapi juga pemasok utama bahan baku di berbagai industri. Sejalan dengan tingkatan nasional, sektor pertanian di Provinsi Jambi masih menjadi pilar utama perekonomian daerah. Baik dari sisi penciptaan nilai tambah maupun penyediaan kesempatan kerja.



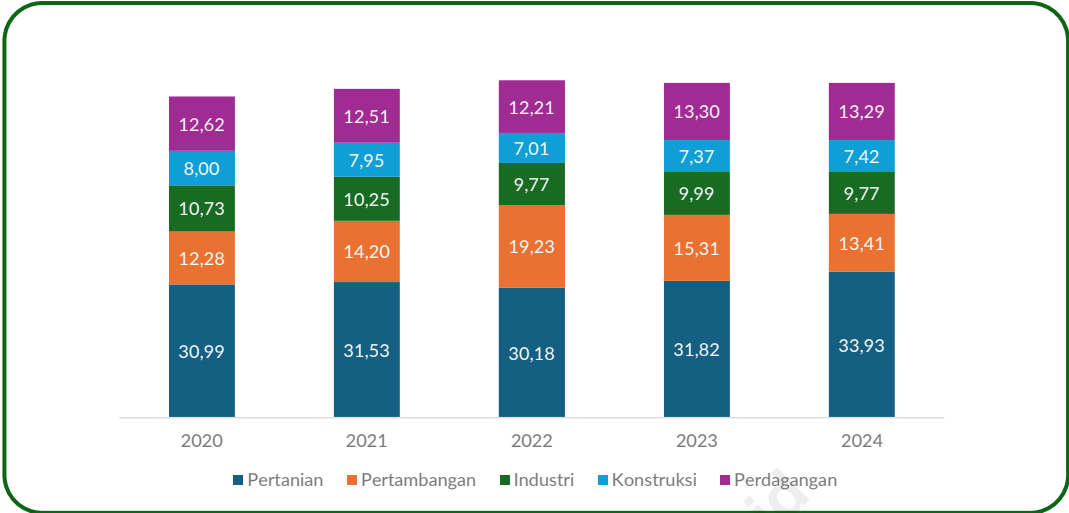
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Jambi Agustus 2024

Gambar 1.1 Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Agustus 2024

Pada Agustus 2024, lapangan pekerjaan utama penduduk Provinsi Jambi masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan menyerap sebanyak 43,92 persen dari total tenaga kerja yang bekerja. Proporsi ini jauh melampaui sektor perdagangan besar dan eceran (16,64 persen), industri pengolahan (4,87 persen), serta konstruksi (4,64 persen). Hal ini menunjukkan besarnya peran sektor pertanian menjadi sumber penghidupan sebagian besar penduduk Provinsi Jambi.

Kontribusi nilai tambah bruto yang konsisten tertinggi terhadap nilai PDRB Provinsi Jambi mencerminkan dominasi sektor pertanian selama lima tahun terakhir (2019–2024). Pada kurun waktu tersebut, sektor pertanian menyumbang rata-rata 30 hingga 34 persen terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku. Nilai ini melampaui sektor pertambangan dan penggalian; serta industri pengolahan. Posisi ini menunjukkan pertanian sebagai penggerak

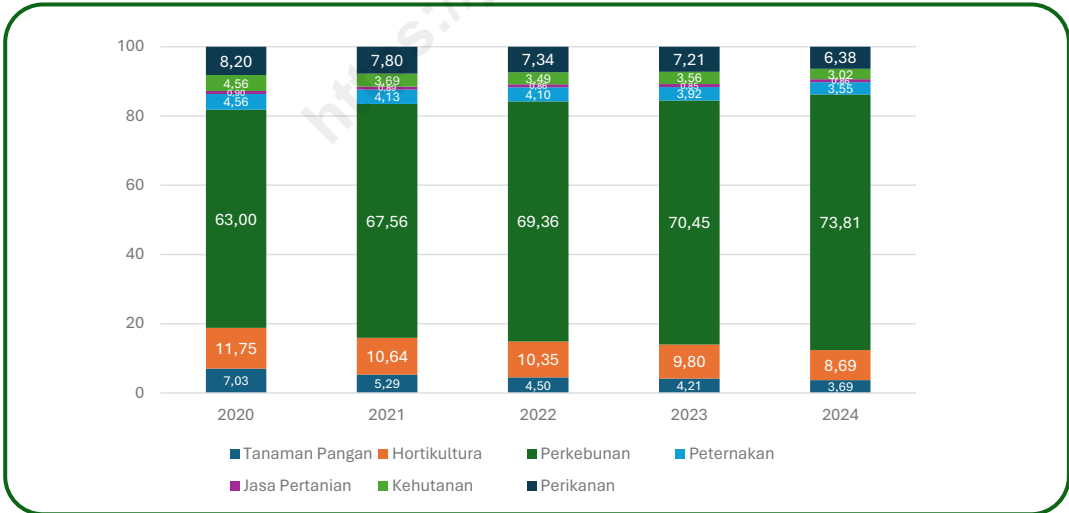
utama sekaligus penyangga stabilitas ekonomi daerah di tengah guncangan fluktuasi harga komoditas global dan dampak pandemi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha 2020–2024

Gambar 1.2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020–2024

Lebih lanjut, pada skala subsektor, tanaman perkebunan secara konsisten menjadi kontributor terbesar dalam sektor pertanian di Provinsi Jambi. Proporsi tanaman perkebunan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, hingga pada tahun 2024 subsektor ini menyumbang 73,81 persen terhadap total nilai tambah bruto sektor pertanian. Sebaliknya,



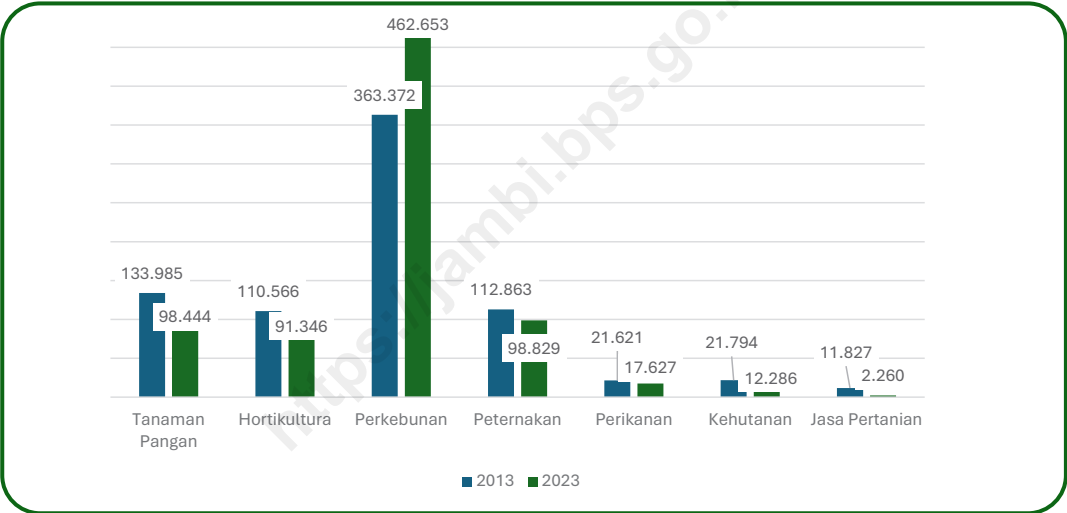
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha 2020–2024)

Gambar 1.3 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

kontribusi subsektor lain seperti tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, kehutanan, dan perikanan cenderung mengalami penurunan.

Data Sensus Pertanian 2023 menegaskan dominasi subsektor perkebunan di Provinsi Jambi. Mayoritas rumah tangga yang mengusahakan pertanian bergerak pada subsektor perkebunan, tercatat sebanyak 462.653 rumah tangga. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, jumlah rumah tangga yang mengusahakan perkebunan mengalami peningkatan pesat hingga 27,32 persen pada 2023. Subsektor ini merupakan satu-satunya yang mencatat kenaikan jumlah petani dalam satu dekade terakhir, sementara subsektor lainnya mengalami penurunan.

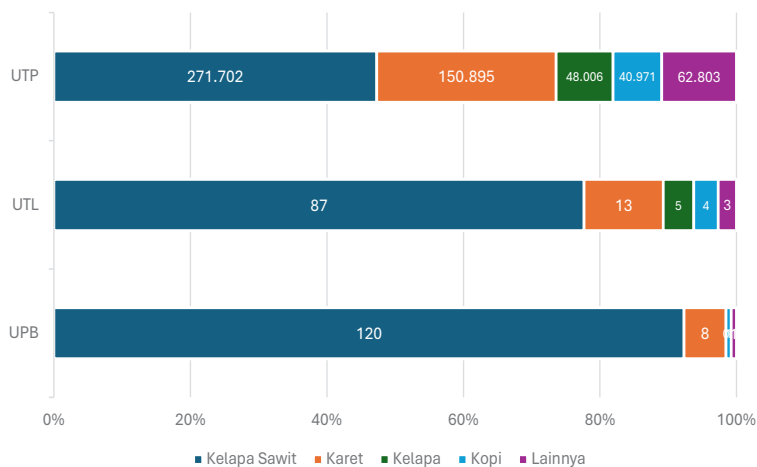
Secara rinci, kelapa sawit merupakan komoditas yang paling banyak diusahakan di subsektor perkebunan. Tercatat, sebanyak 271.702 unit usaha pertanian perorangan (UTP) mengusahakan kelapa sawit, atau lebih dari 50 persen dari total 565.489 UTP perkebunan di Provinsi Jambi. Komoditas ini juga yang terbesar dari seluruh komoditas pertanian yang diusahakan di Provinsi Jambi, di atas komoditas karet dan padi sawah inbrida. Dominasi kelapa sawit juga terlihat pada unit usaha pertanian berbadan hukum (UPB) maupun usaha pertanian lainnya (UTL). Hal ini menunjukkan bahwa komoditas kelapa sawit merupakan menjadi komoditas utama dalam struktur usaha pertanian di Provinsi Jambi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023-Tahap I

Gambar 1.4 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor di Provinsi Jambi (rumah tangga), 2013 dan 2023

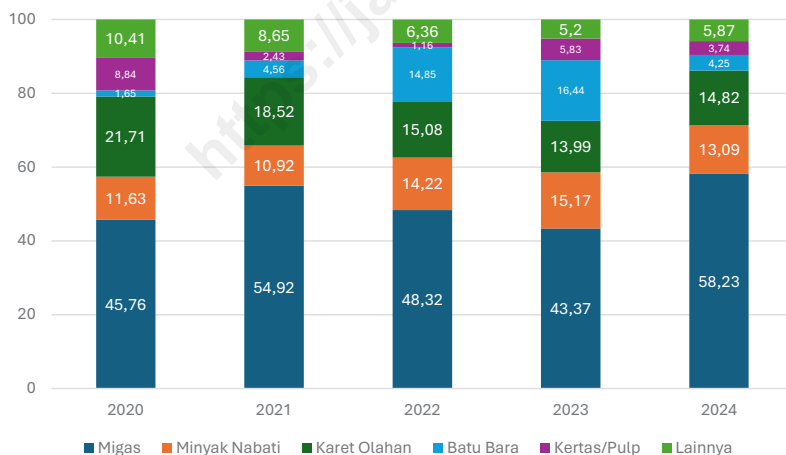
Temuan ini mencerminkan ekspansi areal perkebunan kepala sawit yang masif, sekaligus semakin kuatnya ketergantungan masyarakat Provinsi Jambi terhadap komoditas ini sebagai sumber utama penghidupan. Kelapa sawit kini bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan telah menjadi fondasi perekonomian rakyat di Provinsi Jambi. Komoditas ini juga memiliki keunggulan komparatif karena hampir seluruh bagian tanamannya bernilai ekonomis. Minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) dan minyak inti sawit (*palm kernel oil*/PKO) menjadi bahan baku utama industri pangan, kosmetik, dan oleokimia. Sementara itu, limbah dan residu pengolahan sawit dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak, kompos, hingga bahan bakar alternatif seperti biomassa dan biodiesel.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023-Tahap I

Gambar 1.5 Jumlah Pengusahaan Pertanian Menurut Unit Usaha dan Subsektor di Provinsi Jambi (unit), 2023

Tren perdagangan internasional membuktikan manfaat komoditas kelapa sawit bukan sekadar narasi. Pasar dunia masih bergantung pada komoditas ini, terlihat dari konsistennya kontribusi ekspor produk turunan kelapa sawit yang menjadi penopang utama ekspor Provinsi Jambi setelah migas. Hal ini turut menggerakkan ekonomi baik pada tingkat korporasi besar maupun rumah tangga petani.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Jambi 2024

Gambar 1.6 Perkembangan Nilai Ekspor Asal Provinsi Jambi menurut Komoditas (US\$), 2020–2024

Namun demikian, sektor pertanian di Provinsi Jambi belum mampu memberikan dukungan optimal terhadap perekonomian daerah. Berbagai kendala dan tantangan masih dihadapi di tengah keberlanjutan sektor pertanian khususnya perkebunan.

Tantangan peningkatan produktivitas menjadi hambatan serius bagi rumah tangga dalam mempertahankan usaha pertaniannya. Di tengah peningkatan ongkos usaha, dan margin keuntungan yang semakin kecil, serta tekanan isu keberlanjutan lingkungan dan pembatasan ekspansi lahan, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk mengungkap dinamika struktur biaya produksi sawit di Provinsi Jambi. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi sumber tekanan biaya dan menyusun strategi mitigasi agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dalam meningkatkan produktivitas dan pembangunan ekonomi yang lebih luas.

1.2 Struktur Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi

Struktur pengusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi dapat dibedakan ke dalam tiga kategori utama, yaitu Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Pertanian Lainnya (UTL), dan Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB). UTP merupakan unit yang mengusahakan pertanian secara mandiri, untuk komoditas kelapa sawit mencatat pelaku terbanyak sebesar 271.702 unit. Besarnya jumlah UTP memperlihatkan kuatnya ketergantungan ekonomi rumah tangga pertanian terhadap budidaya sawit.

UTL merupakan bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok tidak berbadan hukum seperti kelompok tani, koperasi, atau komunitas lainnya sebagai wadah kolektif pengelolaan dan penguatan kapasitas petani. Jumlahnya tidak sebanyak dua kategori lainnya, namun memiliki fungsi penting sebagai organisasi kolektif yang mengelola kebun skala kecil hingga menengah, serta memperkuat akses petani terhadap pembinaan, pemasaran, dan input pertanian.

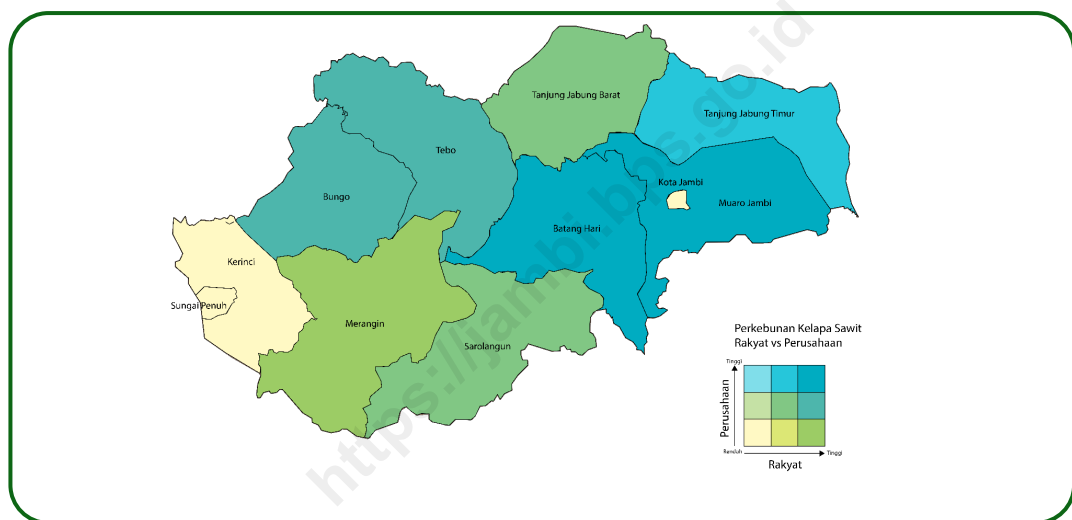
Tabel 1.1 Jumlah Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota dan Unit Usaha di Provinsi Jambi (unit), 2023

Kabupaten/Kota	UTP	UTL	UPB
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	797	–	–
Merangin	45.360	41	2
Sarolangun	27.425	–	16
Batang Hari	31.084	16	17
Muaro Jambi	34.853	2	26
Tanjung Jabung Timur	26.301	–	22
Tanjung Jabung Barat	25.214	7	16
Tebo	45.075	8	11
Bungo	33.483	12	10
Kota Jambi	2.025	1	–
Kota Sungai Penuh	85	–	–
Provinsi Jambi	271.702	87	120

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023-Tahap II Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Perkebunan Provinsi Jambi

Sementara itu, UPB adalah perusahaan berbadan hukum yang beroperasi dengan skala lebih besar dan memiliki keterkaitan erat dengan industri pengolahan. Terdapat 120 UPB yang bergerak di usaha perkebunan kelapa sawit dan menguasai lahan dalam skala besar. Unit usaha ini memiliki integrasi kuat dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), sehingga mendorong efisiensi produksi dan nilai tambah industri. Ketiga kategori tersebut membentuk struktur usaha yang terhubung, UTP menjadi basis produksi rakyat, UTL sebagai rantai penghubung dengan pasar, sedangkan UPB memegang peran kunci dalam skala industri dan hilirisasi. Hubungan ini menjadikan kelapa sawit bukan sekadar komoditas, tetapi sebuah sistem ekonomi terpadu yang menghubungkan petani, kelompok usaha, korporasi, dan industri pengolahan di Provinsi Jambi.

Meski saling terhubung, persebaran perkebunan rakyat (UTP dan UTL) dan perkebunan perusahaan (UPB) tidak seragam di setiap kabupaten/kota. Ada wilayah yang kuat di sawit rakyat, ada pula yang lebih didominasi oleh perusahaan, sementara sebagian lainnya menunjukkan keseimbangan di antara keduanya. Jika dipetakan secara *bivariate* antara sawit rakyat dan sawit perusahaan, dapat memberikan gambaran awal mengenai struktur geografis sawit Provinsi Jambi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023-Tahap II Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Perkebunan Provinsi Jambi (diolah)

Gambar 1.7 Distribusi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Perusahaan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2023

Pemetaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi menunjukkan adanya polarisasi antara wilayah industri terintegrasi dan basis produksi rakyat. Muaro Jambi dan Batang Hari muncul sebagai kluster utama dengan integrasi hulu-hilir yang kuat, ditandai oleh tingginya jumlah perkebunan rakyat dan perusahaan yang mencerminkan konsentrasi investasi serta infrastruktur industri. Sebaliknya, wilayah Bungo, Tebo, dan khususnya Merangin, merupakan sentra produksi rakyat yang masif namun belum diimbangi dengan industrialisasi yang setara. Persoalan utama di sentra produksi rakyat nonmitra adalah lemahnya struktur tata niaga dan rantai pasok (Syahyuti, 2011). Ketimpangan di wilayah-wilayah ini menuntut prioritas intervensi berupa penguatan akses ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), perbaikan tata niaga, serta program peremajaan (PSR) agar nilai tambah komoditas tidak berhenti di tingkat bahan baku.

Sementara itu, wilayah pesisir seperti Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat memegang peran strategis sebagai simpul distribusi dan hilirisasi. Tingginya aktivitas perusahaan dibanding produksi petani lokal mengindikasikan fungsi wilayah ini sebagai penyerap pasokan lintas kabupaten yang memanfaatkan kedekatan dengan jalur logistik ekspor. Kondisi ini kontras dengan Kerinci, Kota Jambi, dan Sungai Penuh yang dikategorikan sebagai wilayah non-sentra kelapa sawit karena minimnya aktivitas perkebunan maupun industri, melengkapi pemetaan karakteristik ekonomi sawit provinsi yang beragam.

Distribusi antarwilayah tersebut menegaskan posisi perkebunan rakyat sebagai unit ekonomi yang persisten dan adaptif di Provinsi Jambi. Sejalan dengan temuan Susila (2010) yang menyatakan bahwa perkebunan rakyat berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) pendapatan yang lebih inklusif dibandingkan korporasi yang cenderung terkonsentrasi pada titik-titik tertentu. Perkebunan rakyat tersebar lebih merata dan berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi daerah, baik di wilayah sentra industri maupun di kawasan perintis yang masih berkembang. Pola sebaran ini dapat menentukan strategi bertahan petani dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, yang salah satunya terlihat melalui cara mereka mengelola dan memanfaatkan lahan. Data memperlihatkan adanya polarisasi strategi pengusahaan yang menarik antara wilayah hulu dan pesisir.

Tabel 1.2 Distribusi Pola Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (unit), 2023

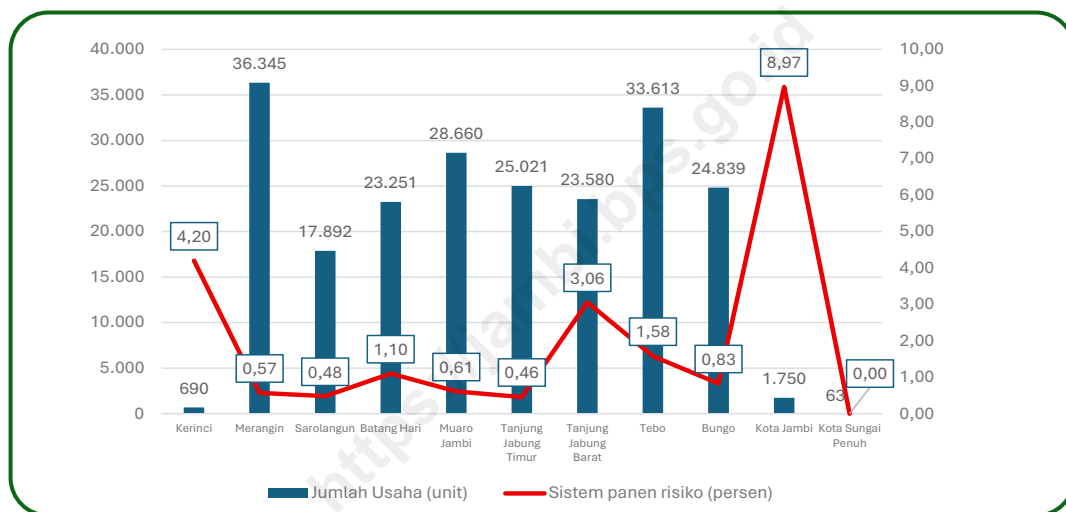
Kabupaten/Kota	Monokultur	Diversifikasi
(1)	(2)	(3)
Kerinci	770	26
Merangin	44.197	1.080
Sarolangun	25.759	1.589
Batang Hari	29.807	1.216
Muaro Jambi	33.498	1.242
Tanjung Jabung Timur	21.151	5.140
Tanjung Jabung Barat	21.264	3.948
Tebo	41.126	3.690
Bungo	32.366	1.021
Kota Jambi	1.928	58
Kota Sungai Penuh	79	6
Provinsi Jambi	251.945	19.016

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023-Tahap II Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Perkebunan Provinsi Jambi

Sistem budidaya kelapa sawit secara monokultur adalah pola pengusahaan di mana hanya satu jenis tanaman dibudidayakan pada satu hamparan lahan dalam satu siklus produksi. Sebaliknya, sistem penanaman multikultur/diversifikasi melibatkan lebih dari satu jenis tanaman pada lahan yang sama, baik secara bersamaan melalui pola tumpangsari maupun

dalam bentuk campuran yang teratur. Seperti terlihat pada Tabel 1.2, sentra produksi kelapa sawit rakyat di kabupaten/kota di Provinsi Jambi didominasi oleh pola monokultur lebih dari 92 persen. Pola ini menunjukkan kecenderungan spesialisasi produksi yang berorientasi pada efisiensi skala ekonomi. Sebaliknya, wilayah pesisir yaitu Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat menunjukkan tingkat diversifikasi yang lebih tinggi, yaitu 19,53 persen dan 15,66 persen.

Meskipun sistem monokultur menawarkan kemudahan manajemen bagi korporasi besar, literatur menunjukkan bahwa sistem diversifikasi bagi petani rakyat adalah strategi adaptasi ekonomi yang paling rasional untuk menghadapi volatilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) dan masa tunggu panen. Kekhawatiran bahwa diversifikasi akan menurunkan produksi sawit dibantah oleh temuan Khasanah et al. (2020), yang menunjukkan bahwa sistem agroforestri sawit yang dikelola dengan baik justru memiliki rendemen minyak yang setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan monokultur, berkat perbaikan mikroklimat dan kesuburan tanah. Pada fase Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Kusumawati et al. (2019) menemukan bahwa pendapatan petani dari tanaman sela jagung mampu menutupi biaya pemeliharaan sawit.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023-Tahap II Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Perkebunan Provinsi Jambi (diolah)

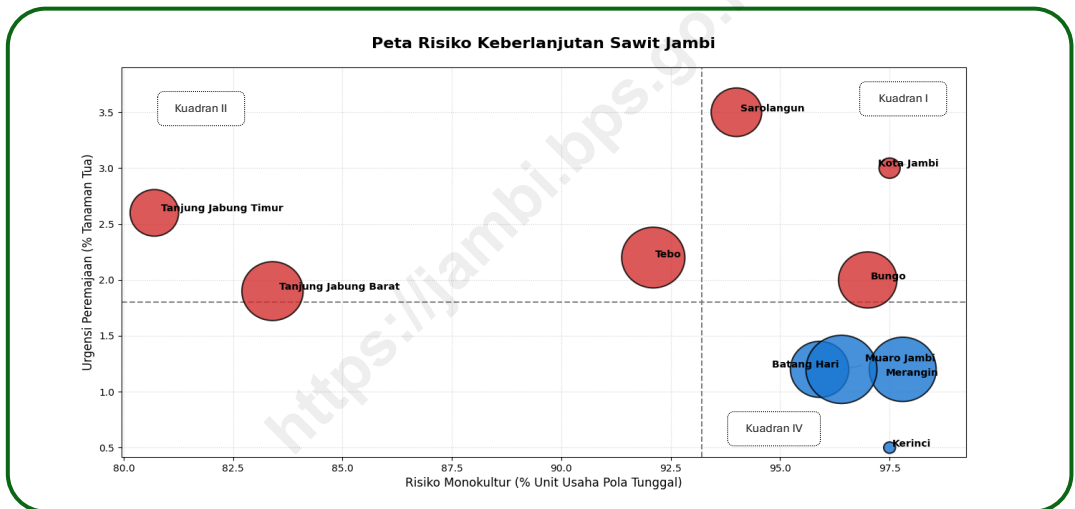
Gambar 1.8 Distribusi Unit Usaha Yang Memanen dan Sistem Panen Risiko menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2023

Pada perkebunan sawit rakyat ada beberapa cara mengolah hasil panen, yaitu dengan memanen sendiri, diijonkan, maupun ditebaskan. Sistem panen ijon mengharuskan pemilik menjual tanaman miliknya kepada pembeli saat masih muda dan belum matang. Sedangkan sistem panen ditebaskan dilakukan ketika tanaman sudah siap panen (sudah tua), dengan cara pembeli (penebas) menaksir total hasil panen kemudian membayarnya, pembeli bertanggung jawab melakukan pemanenan sendiri. Sistem pemanenan ijon dan tebaskan mengandung struktur risiko yang kompleks. Seperti diungkapkan oleh Yustika (2008), risiko terbesar bagi petani justru terletak pada lemahnya posisi tawar akibat desakan likuiditas (butuh uang cepat) dan kesalahan informasi, yang menyebabkan petani menerima harga jauh di bawah harga pasar. Gambar 1.8 memperlihatkan bahwa mayoritas petani kelapa sawit rakyat (78,36

persen) menerapkan sistem pemanenan sendiri, menjadikannya praktik dominan di tingkat hulu. Garis merah pada gambar menunjukkan bahwa tingkat risiko keterikatan pasar melalui skema ijon atau tebaskan pada sentra produksi utama relatif sangat rendah, di bawah satu persen. Risiko lebih tinggi hanya muncul pada beberapa wilayah tertentu seperti Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi.

Praktik dominan swakelola panen memiliki implikasi biaya yang signifikan. Sejalan dengan temuan Euler et al. (2017), sistem panen sendiri umumnya menggunakan tenaga kerja keluarga yang memungkinkan petani menekan pengeluaran tunai (*cash outcome*) untuk aktivitas panen yang lazimnya menjadi komponen biaya tenaga kerja terbesar. Efisiensi tersebut menjadi salah satu pilar ketahanan ekonomi petani sawit rakyat dalam jangka pendek, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga (Budidarsono et al., 2013). Di balik ketangguhan tersebut, analisis matriks kuadran mengungkapkan dua ancaman serius yang dapat menggoyahkan keberlanjutan ekonomi petani di masa depan.

Pemetaan dua dimensi berdasarkan risiko pasar akibat dominasi monokultur (sumbu X) dan tingkat urgensi peremajaan yang direpresentasikan oleh proporsi Tanaman Tua Menghasilkan/TTM (sumbu Y) menunjukkan pemilahan posisi kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang krusial bagi perencanaan intervensi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023-Tahap II Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Perkebunan Provinsi Jambi (diolah)

Gambar 1.9 Distribusi Sistem Panen Monokultur dan Tanaman Tidak Menghasilkan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2023

Wilayah seperti Sarolangun dan Kota Jambi berada pada zona risiko tertinggi akibat kombinasi ketergantungan pada pola monokultur dan tingginya kebutuhan peremajaan. Situasi ini menandakan kerentanan ganda, baik dari sisi produktivitas maupun stabilitas pendapatan rumah tangga pertanian. Kondisi ini selaras dengan temuan Jelsma et al. (2019) bahwa hambatan utama *replanting* adalah hilangnya pendapatan jangka pendek. Perkebunan rakyat dengan sumber pendapatan tunggal lebih rentan terhadap guncangan pendapatan (*income shock*) dan gejolak harga komoditas. Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada kelompok ini menuntut pendekatan menyeluruh yang tidak hanya menekankan penyediaan sarana produksi (benih dan pupuk), tetapi juga instrumen penyangga ekonomi seperti skema

Padat Karya Tunai (PKT) dan integrasi tanaman sela untuk menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga.

Sementara itu, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat menunjukkan urgensi peremajaan yang sama tingginya, namun risiko pasar relatif lebih rendah karena praktik diversifikasi yang telah berkembang di tingkat usaha tani, khususnya pada lahan pasang surut. Kondisi ini memberikan ruang kebijakan yang lebih adaptif, di mana intervensi dapat difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui benih unggul, pemupukan berimbang, pendampingan teknis, serta penguatan akses pasar (Zen et al., 2016).

Di sisi lain, Merangin, Muaro Jambi, dan Tebo termasuk wilayah yang secara produktivitas masih aman karena dominasi tanaman muda dan menghasilkan. Namun, tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada kelapa sawit menempatkan wilayah ini pada risiko laten jangka panjang. Fenomena jebakan spesialisasi (*specialization trap*) yang disebut Feintrenie et al. (2010) sebagai efek *lock-in* pada konteks ini menunjukkan bahwa stabilitas saat harga CPO tinggi bersifat sementara. Kebijakan yang tepat adalah mendorong diversifikasi bertahap, pengembangan hilirisasi skala mikro, serta perluasan akses pembiayaan berbasis komoditas untuk memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.

Pemetaan kuadran tersebut memberikan dasar penting dalam penetapan prioritas kebijakan peremajaan. Namun, keberlanjutan ekonomi usaha sawit rakyat tidak hanya ditentukan oleh faktor umur tanaman dan risiko pasar, melainkan juga oleh efisiensi biaya dan struktur ongkos produksi. Oleh karena itu, untuk melengkapi pemahaman mengenai daya tahan ekonomi usaha sawit rakyat, analisis selanjutnya memuat keadaan struktur biaya produksi dan indikator efisiensi usaha perkebunan sawit rakyat Provinsi Jambi.

1.3 Struktur Ongkos dan Efisiensi Ekonomi Usaha Tani Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi

Mengacu pada data struktur ongkos usaha tani yang dihimpun BPS melalui Survei Ekonomi Pertanian 2024 (SEP 2024), analisis berikut menelaah bagaimana strategi kemandirian petani Jambi dalam proses panen tercermin dalam komposisi biaya produksi mereka. Jika bagian sebelumnya menyoroti *self-harvesting* sebagai strategi adaptif, maka struktur ongkos memberikan indikasi kuantitatif mengenai sejauh mana strategi tersebut memengaruhi kesehatan finansial usaha tani. Perbandingan antara komposisi biaya rata-rata petani Jambi dan rata-rata nasional menampakkan pola efisiensi yang tidak lazim sekaligus memperlihatkan bentuk-bentuk penyesuaian investasi yang dilakukan petani untuk menjaga daya saing biaya.

Komponen Upah/Jasa Pertanian di Jambi hanya mencapai 3,09 persen dari total biaya, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 26,27 persen (Tabel 1.3). Selisih hampir 23 poin persentase ini mencerminkan efek langsung dari sistem *self-harvesting* yang mengandalkan tenaga kerja keluarga. Temuan ini sejalan dengan Kariyasa (2015), yang menunjukkan bahwa daya saing biaya petani rakyat Indonesia terutama bersumber dari substitusi tenaga kerja berupah dengan tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar tunai. Sementara di tingkat nasional komponen upah menjadi salah satu biaya terbesar, di Jambi biaya ini hampir tidak tercatat sebagai arus kas keluar. Implikasinya, struktur biaya petani Jambi menjadi sangat ramping dan relatif tahan terhadap kenaikan UMP maupun kelangkaan tenaga pemanen.

Minimnya beban upah menyebabkan struktur biaya bergeser ke input fisik, dengan pupuk sebagai komponen pengeluaran terbesar yang benar-benar ditanggung secara tunai (20,05 persen), sedikit lebih tinggi daripada rata-rata nasional (18,68 persen). Konsisten dengan temuan Woittiez et al. (2017), tingginya porsi biaya pupuk terhadap total biaya operasional (mencapai 40–60 persen) membuat petani swadaya sangat sensitif terhadap fluktuasi harga pupuk. Kenaikan harga, bahkan yang bersifat moderat, sering direspons dengan pengurangan dosis pemupukan yang berpotensi menurunkan produktivitas. Dengan demikian, risiko finansial petani Jambi lebih dipengaruhi oleh volatilitas harga pupuk dibandingkan fluktuasi biaya tenaga kerja.

Tabel 1.3 Persentase Rata-rata Ongkos Usaha dari Total Pengeluaran Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Provinsi Jambi dan Indonesia, 2024

Komponen Biaya (Proporsi dari Total Biaya)	Provinsi Jambi	Indonesia
(1)	(2)	(3)
Benih	0,76	2,14
Pupuk	20,05	18,68
Pestisida	4,29	4,32
Upah/jasa pertanian	3,09	26,27
BBM & pelumas	0,02	3,73
Listrik & air	0,14	0,05
Sewa lahan	26,21	40,81
Pengeluaran lainnya	3,85	4,00

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Ekonomi Pertanian 2024 (diolah)

Di balik efisiensi biaya yang terlihat, terdapat indikasi rendahnya investasi jangka panjang. Alokasi belanja benih hanya 0,76 persen, jauh di bawah rata-rata nasional (2,14 persen). Angka ini mengarah pada dua interpretasi yaitu stagnasi peremajaan karena petani tidak melakukan investasi bibit baru, dan penggunaan bibit tidak bersertifikat pada kegiatan penyesipan. Fenomena penggunaan bibit asalan ini dijelaskan secara luas oleh Jelsma et al. (2017) sebagai bentuk penghematan yang keliru. Meskipun menekan biaya saat ini, praktik tersebut menghasilkan produktivitas yang terjebak pada level rendah, sehingga memperkuat risiko keberlanjutan yang telah dibahas sebelumnya.

Jika ditinjau dari aspek penggunaan tenaga kerja, petani Jambi (kolom 2) menunjukkan deviasi yang sangat besar dari pola nasional (kolom 3). Regulasi pemerintah seperti yang bersumber dari Permentan 131/2013 dan teknis yang umum diterapkan pada PKS mengasumsikan kebutuhan tenaga kerja budidaya kelapa sawit berada pada kisaran 3,5 HOK per hektare untuk umur tanaman kurang dari lima tahun dengan valuasi setara upah minimum regional. Namun, keadaan petani sawit rakyat di Provinsi Jambi memperlihatkan bahwa komponen ini hampir tidak muncul dalam struktur biaya petani Jambi. Kondisi tersebut menegaskan bahwa standar biaya produksi yang bersifat normatif tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi subsisten petani swadaya sebenarnya, terutama ketika strategi produksi berbasis tenaga kerja keluarga menjadi praktik dominan di masyarakat.

Tabel 1.4 Perbandingan Komponen Biaya dan Isu Teknis Perkebunan Kelapa Sawit: Petani Jambi, Standar Nasional, dan Tren Global

Komponen Biaya/Isu	Data Petani Jambi ¹⁾	Standar Nasional ²⁾	Tren Global ³⁾
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Kerja	Nyaris Nihil (3,09 persen)	Komponen Penting dalam Pemeliharaan dan Panen	Isu Kritis Global
	Model: Swakelola/ Keluarga.	Model: HOK (hari orang kerja)/ha sesuai dengan topografi, kerapatan panen, dan umur tanaman (upah minimum regional)	Kenaikan biaya tenaga kerja signifikan (320 persen di Malaysia sejak tahun 2001).
	Tidak ada standar upah, biaya dianggap nol (tidak diimputasi).	Standar: penunasan pelepah hingga 3,5 HOK/ha untuk umur kurang 5 tahun	
Pupuk	Dominan (20,05%)	Komponen Biaya Utama	Input Kritis Penentu Margin
	Biaya terbesar, tapi dosis seringkali di bawah standar (<i>under-fertilizing</i>) karena keterbatasan modal tunai.	Model: Dosis Rekomendasi. Dalam Permentan, pupuk dihitung berdasarkan dosis teknis (5-6 kg/ pohon/tahun) disesuaikan umur dan tinggi pohon.	Pupuk sebagai input kritis (20-30 persen dari total biaya input), meningkatkan ongkos usaha secara fluktuatif
Benih	Minimal (0,76%)	Investasi Awal Jangka Panjang	Investasi Jangka Panjang
	Indikasi bibit sapuan/ palsu.	Model: Penggunaan bibit unggul (legitimasi sertifikat). 3-8 persen dari total biaya produksi.	Malaysia unggul di produktivitas tinggi tapi rentan kenaikan biaya.
Efisiensi	Efisiensi Alokatif	Efisiensi Teknis	<i>Cost Competitiveness</i>
	Menang karena "Biaya Murah" (Input Rendah).	Menang karena "Produktivitas Tinggi".	Indonesia unggul di biaya rendah, Malaysia unggul di produktivitas per hektar.

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik, Survei Ekonomi Pertanian 2024 (diolah)
 2) Kementerian Pertanian Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis Jacq.*) yang Baik
 3) James Fry (LMC Internasional 2015), *Influences upon palm oil production costs*

Dari perspektif keterhubungan dengan dinamika global (kolom 4), terlihat bahwa petani Jambi mengalami tekanan biaya yang serupa dengan industri global pada sisi harga pupuk, namun tidak menghadapi tekanan yang sama pada komponen upah tenaga kerja. Dengan demikian, posisi ekonomi petani Jambi bersifat dualistik, dimana sangat rentan

terhadap guncangan pasar sarana produksi, tetapi relatif terlindungi dari fluktuasi pasar tenaga kerja. Kombinasi ini menempatkan petani Jambi pada konfigurasi risiko yang khusus saat keadaan ekonomi lebih dipengaruhi oleh volatilitas harga input fisik dibandingkan dinamika biaya tenaga kerja yang menjadi isu utama di perkebunan skala besar.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kombinasi penghematan tenaga kerja dan minimnya investasi benih tersebut bermuara pada kinerja finansial. Tabel 1.5 menunjukkan bahwa petani Jambi justru mencatatkan tingkat efisiensi yang melampaui rata-rata nasional. Margin laba mencapai 59,70 persen, yang berarti hampir 60 persen pendapatan usaha tani merupakan keuntungan bersih setelah memperhitungkan imputasi sewa lahan dan tenaga kerja keluarga. Untuk standar usaha komoditas, margin ini tergolong sangat tinggi.

Tabel 1.5 Perbandingan Indikator Efisiensi Usaha Kelapa Sawit di Provinsi Jambi dan Indonesia, 2024

Indikator Efisiensi Usaha	Provinsi Jambi	Indonesia
(1)	(2)	(3)
Harga Jual Petani (000 Rp/kg)	2,12	2,12
Biaya Produksi (000 Rp/kg)	0,86	≈0,81–0,88
Pendapatan (000 Rp/kg)	1,27	≈1,20–1,30
R/C Ratio	2,48	≈2,41
Margin (π/R)	59,70%	≈50%
Break-even Price/BEP (Rp/kg)	≈856/kg	≈800–880/kg

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Ekonomi Pertanian 2024 (diolah)

Tingkat keuntungan yang besar tersebut tidak terutama didorong oleh produktivitas yang unggul yang justru berisiko stagnan akibat penggunaan benih berbiaya rendah, melainkan oleh mekanisme penekanan biaya (*cost suppression*) yang kuat melalui swakelola panen. Temuan ini sejalan dengan Budidarsono et al. (2013), yang menunjukkan bahwa strategi nafkah petani rakyat cenderung mengikuti pola *low-input* guna memaksimalkan Sisa Hasil Usaha (SHU) jangka pendek, meskipun dengan konsekuensi pengorbanan potensi hasil optimal lahan.

Biaya produksi petani sawit rakyat di Provinsi Jambi yang relatif rendah (Rp856/kg) memungkinkan mereka meraih margin keuntungan yang lebih besar bahkan ketika harga jual berada pada tingkat yang setara dengan rata-rata nasional (Rp2.120/kg). Pola ini konsisten dengan temuan Euler et al. (2017) di Jambi serta analisis global LMC International (Fry J, 2015), yang menyimpulkan bahwa profitabilitas petani sawit rakyat Indonesia terutama ditopang oleh struktur biaya yang *ramping*. Dengan demikian, keunggulan finansial petani tidak bersumber dari skala atau teknologi produksi, tetapi dari kemampuan menjaga biaya tunai pada tingkat minimal, yang menghasilkan margin ekonomi lebih tebal dibandingkan pelaku usaha yang lebih padat modal.

1.4 Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi

Analisis struktur ongkos sebelumnya menunjukkan bahwa petani sawit rakyat di Provinsi Jambi memiliki efisiensi biaya yang tinggi dan rasio profitabilitas (R/C) yang sehat. Namun, temuan mengenai sangat rendahnya alokasi biaya untuk investasi benih berkualitas (0,76 persen) menyisakan pertanyaan mendasar, mengapa investasi produktivitas jangka panjang tetap minim meskipun usaha tani mereka menguntungkan. Data kesejahteraan dan perilaku finansial memberikan jawaban yang lebih komprehensif. Profitabilitas tinggi tidak secara otomatis mencerminkan akumulasi modal, melainkan menandakan kondisi keseimbangan statis di mana pendapatan yang diperoleh terutama terserap untuk mempertahankan taraf hidup pada tingkat “cukup”.

Tabel 1.6 Indikator Kesejahteraan Subjektif Petani Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi, 2024

Indikator	Kategori	Persentase
(1)	(2)	(3)
Keadaan ekonomi dibanding setahun lalu	Meningkat	24,17
	Stabil	55,83
	Menurun	20,00
Pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga	Baik	15,89
	Cukup	70,16
	Kurang	13,95
Kekhawatiran tidak memiliki cukup makanan setahun terakhir	Tidak Khawatir	93,70
	Khawatir	5,78

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Ekonomi Pertanian 2024 (diolah)

Indikator kesejahteraan subjektif memperlihatkan bahwa sebagian besar petani berada dalam kondisi aman namun stagnan. Ketahanan pangan sangat terjamin, sebanyak 93,70 persen tidak pernah merasa khawatir kekurangan makanan, menunjukkan bahwa sawit berfungsi sebagai penopang kebutuhan dasar yang efektif. Dari sisi kecukupan pendapatan, mayoritas mutlak (70,16 persen) menyatakan pendapatan mereka hanya “cukup”, dan hanya sebagian kecil yang menilai pendapatannya “baik”. Persepsi dinamika ekonomi memperkuat hal ini, dengan 55,83 persen menggambarkan kondisi mereka sebagai “stabil”.

Data tersebut mengonfirmasi bahwa tingginya R/C ratio lebih berperan menjaga biaya hidup daripada menciptakan ruang akumulasi modal. Situasi ini konsisten dengan teori *Labor-Consumer Balance* dari A.V. Chayanov (1986), yang menjelaskan bahwa petani cenderung menghentikan ekspansi usaha ketika kebutuhan dasar rumah tangga terpenuhi. Mereka berada pada titik keseimbangan “cukup dan stabil”, dimana kondisi merasa tidak miskin, namun tidak memiliki kelonggaran finansial untuk berinvestasi dalam kegiatan berisiko tinggi seperti peremajaan kebun.

Rendahnya investasi benih juga tidak dapat dilepaskan dari minimnya hubungan petani dengan lembaga keuangan formal. Data Tabel 1.7 menunjukkan bahwa 98,00 persen petani mengaku tidak mengalami kesulitan akses kredit, namun hanya 5,50 persen yang

benar-benar memanfaatkan kredit untuk keperluan usaha. Kesenjangan ini menandakan adanya fenomena *risk rationing* (Boucher et al., 2008), di mana petani yang layak kredit memilih tidak meminjam karena kekhawatiran terhadap risiko gagal bayar dan kehilangan agunan. Dengan demikian, pernyataan “tidak sulit” lebih memberikan indikasi bahwa mereka tidak pernah mencoba mengakses kredit, bukan karena aksesnya memang mudah.

Tabel 1.7 Akses Kredit pada Petani Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi, 2024

Indikator	Kategori	Persentase
(1)	(2)	(3)
Mengalami kesulitan dalam mengakses kredit	Ya	2,00
	Tidak	98,00
Memiliki kredit dan memanfaatkannya untuk merespon permasalahan produksi & rumah tangga	Memiliki dan memanfaatkan	5,50
	Memiliki namun tidak memanfaatkan	7,60
	Tidak memiliki kredit	86,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Ekonomi Pertanian 2024 (diolah)

Tanpa modal usaha dari perbankan, petani hanya mengandalkan modal sendiri yang terbatas. Konsekuensinya, investasi pada bibit unggul tidak terjadi, dan petani terperangkap dalam *lock-in effect* sebagaimana dikemukakan Jelsma et al. (2017), yakni siklus produktivitas rendah akibat keputusan awal penggunaan bibit murah yang sulit diperbaiki tanpa peremajaan total. Kerentanan juga muncul pada sisi input. Meskipun sebagian besar petani relatif mudah memperoleh sarana produksi (85,44 persen), masih terdapat 14,56 persen petani yang menghadapi hambatan akses terhadap input perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini mengindikasikan potensi terjadinya kompromi dalam pemeliharaan kebun, seperti pengurangan dosis pupuk atau penundaan penggunaan input lainnya, yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas.

Minimnya interaksi dengan lembaga keuangan ternyata sejalan dengan minimnya dukungan negara. Sebanyak 76,38 persen petani tidak menerima bantuan sosial atau subsidi apa pun dalam setahun terakhir (Tabel 1.8). Ada menunjukkan dua kemungkinan, kemungkinan pertama dimana petani sawit Jambi terbukti resilien. Tingkat keuntungan yang stabil menjadikan usaha pertanian kelapa sawit mereka sebagai kegiatan ekonomi yang efektif dalam menopang ekonomi rumah tangga.

Kemungkinan lainnya, dimana ketiadaan intervensi eksternal membuat mereka sulit bertransformasi. Mereka mampu bertahan dalam mempertahankan perkebunannya. Di sisi lain, sebenarnya mereka juga tidak mampu melangkah mengikuti modernisasi praktik budidaya, karena tidak tersedia dukungan eksternal untuk menutup kesenjangan modal dan risiko.

Tabel 1.8 Ketersediaan Bahan Input pada Petani Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi, 2024

Indikator	Kategori	Persentase
(1)	(2)	(3)
Mengalami kesulitan akses terhadap bahan input	Ya	14,56
	Tidak	85,44
Pernah menerima subsidi/program bantuan sosial selama setahun terakhir	Tidak menerima bantuan/subsidi	76,38
	Minimal pernah menerima bantuan/subsidi	23,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Ekonomi Pertanian 2024 (diolah)

Paduan data kesejahteraan dan finansial menunjukkan potret petani sawit rakyat Provinsi Jambi sebagai kelompok yang tahan pangan dan stabil secara ekonomi namun mengalami stagnasi modal. Paradoks pada keuntungan maksimal pertanian kelapa sawit sedikit terjelaskan, keuntungan yang mereka hasilkan dari struktur biaya yang efisien tidak menciptakan akumulasi modal, tetapi habis digunakan untuk mempertahankan taraf hidup subsisten. Minimnya akses kredit dan rendahnya dukungan pemerintah memperkuat insentif untuk tetap berada dalam zona nyaman jangka pendek. Dalam kondisi demikian, investasi produktivitas jangka panjang seperti penggunaan benih unggul atau peremajaan kebun dengan input yang berkualitas tidak menjadi pilihan rasional.

1.5 Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dominasi pola swakelola panen (78,30 persen) terbukti menjadi determinan utama efisiensi biaya produksi. Hal ini dikonfirmasi oleh rendahnya proporsi upah tenaga kerja (3,09 persen) serta tingginya rasio profitabilitas usaha tani (*R/C ratio* sebesar 2,48), yang mengindikasikan bahwa optimalisasi tenaga kerja keluarga mampu menekan biaya operasional secara signifikan. Terdapat polarisasi pola pengusahaan yang signifikan antarwilayah. Wilayah hulu menunjukkan preferensi kuat terhadap monokultur (lebih dari 92 persen), sedangkan wilayah pesisir memperlihatkan tingkat diversifikasi yang lebih tinggi (15–19 persen) sebagai mekanisme adaptif petani dalam memitigasi risiko volatilitas harga komoditas.

Rendahnya alokasi modal untuk input benih (0,76 persen) merefleksikan minimnya investasi jangka panjang petani. Kondisi ini mengindikasikan adanya stagnasi dalam upaya peremajaan tanaman (*replanting*), yang berpotensi mendegradasi produktivitas kebun secara agregat di masa mendatang. Profil risiko usaha tani menunjukkan variasi spasial yang khas. Kabupaten Sarolangun dan Kota Jambi menghadapi eksposur risiko ganda berupa tingginya proporsi Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan dominasi monokultur. Sebaliknya, wilayah Merangin, Muaro Jambi, dan Tebo terindikasi mengalami fenomena “jebakan stabilitas” jangka pendek akibat ketergantungan yang ekstrem terhadap kelapa sawit.

Efektivitas akses keuangan masih rendah. Meskipun persepsi kemudahan akses kredit tergolong tinggi, tingkat utilitasnya sangat minim. Akibatnya, tidak terjadi akumulasi modal yang memadai untuk membiayai peremajaan maupun intensifikasi kualitas kebun.

2. Saran

Perlu dilakukan akselerasi program PSR, khususnya pada wilayah berisiko tinggi, melalui skema pembiayaan holistik. Skema ini harus mengintegrasikan fasilitas kredit lunak dengan jaring pengaman pendapatan (*income support*) selama masa TBM, serta insentif bagi penanaman tanaman sela. Intervensi penyediaan benih bersertifikat perlu diperkuat melalui mekanisme operasi pasar, pemberdayaan penangkar lokal, dan subsidi yang presisi. Langkah ini krusial untuk menjamin standarisasi input produksi guna meningkatkan produktivitas jangka panjang.

Pada wilayah yang didominasi monokultur, strategi diversifikasi sistem tanam berbasis multikultur harus didorong secara aktif melalui pengembangan sistem tumpang sari dan integrasi tanaman-ternak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan resiliensi ekonomi rumah tangga petani terhadap guncangan pasar. Peningkatan inklusi keuangan memerlukan pendekatan proaktif dan penyederhanaan prosedur administratif kredit. Strategi ini diharapkan mampu menstimulasi arus modal kerja dan investasi petani, sehingga akses keuangan dapat terkonversi menjadi kinerja produktif.

Perbaikan struktur pasar perlu dilakukan melalui penguatan kemitraan strategis antara petani dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan optimalisasi peran koperasi pemasaran. Selain itu, penyediaan infrastruktur logistik di wilayah non-sentra industri mendesak dilakukan untuk mengurangi kurangnya informasi dan inefisiensi rantai pasok.

1.6 Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2024). *Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I*. BPS Provinsi Jambi.
- (2024). *Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha pertanian perorangan (UTP) tanaman perkebunan Provinsi Jambi*. BPS Provinsi Jambi.
- (2024). *Indikator pasar tenaga kerja Provinsi Jambi Agustus 2024*. BPS Provinsi Jambi.
- (2024). *Produk domestik regional bruto Provinsi Jambi menurut lapangan usaha 2020-2024*. BPS Provinsi Jambi.
- (2024). *Statistik perdagangan luar negeri Provinsi Jambi 2024*. BPS Provinsi Jambi.
- (2024). *Survei Ekonomi Pertanian 2024*. BPS Provinsi Jambi.
- Boucher, S. R., Carter, M. R., & Guirking, C. (2008). *Risk rationing and wealth effects in credit markets: Theory and implications for agricultural development*. American Journal of Agricultural Economics, 90(2), 409-423. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8276.2007.01116.x>
- Budidarsono, S., Susanti, A., & Zoomers, A. (2013). *Oil palm plantations in Indonesia: The implications for migration, settlement/resettlement and local economic development*. Z. Fang (Ed.), *Biofuels - Economy, environment and sustainability* (pp. 173-194). IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/53585>
- Euler, M., Krishna, V., Schwarze, S., Siregar, H., & Qaim, M. (2017). *Oil palm adoption, household welfare, and nutrition among smallholder farmers in Indonesia*. World Development, 93, 219-235. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.019>
- Fry, J. (2015, September). *Influences upon palm oil production costs [Conference presentation]*. Fedepalma Congress, Cartagena de Indias, Colombia. <https://fedepalma.org/wp-content/uploads/2015/09/1-James-Fry-Production-Costs.pdf>
- Jelsma, Idsert & Schoneveld, G.C. & Zoomers, Annelies & van Westen, A.C.M., 2017.

Unpacking Indonesia's independent oil palm smallholders: An actor-disaggregated approach to identifying environmental and social performance challenges. *Land Use Policy*, Elsevier, vol. 69(C), pages 281-297.

- Khasanah, N., van Noordwijk, M., Slingerland, M., Sofiyudin, M., Stomph, D., Migeon, A. F., & Hairiah, K. (2020). *Oil palm agroforestry can achieve economic and environmental gains as indicated by multifunctional land equivalent ratios*. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 3, 122. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2019.00122>
- Kusumawati SA, S. Yahya, Hariyadi, S.I Mulatsih, DN. Istina. (2019). *Analisis Pendapatan Usahatani Tumpangsari pada Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat. Income Analysis Intercropping Farming System on Smallholder Oil Palm Replanting Area*. *Buletin Palma* Volume 20(1): 45 – 56.
- Susila, W. R. (2012). *Peluang pengembangan kelapa sawit di Indonesia: Perspektif jangka panjang 2025*. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 12(3). <http://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/view/4161>
- Woittiez, L. S., van Wijk, M. T., Slingerland, M., van Noordwijk, M., & Giller, K. E. (2017). *Yield gaps in oil palm: A quantitative review of contributing factors*. *European Journal of Agronomy*, 83, 57-77. <https://doi.org/10.1016/j.eja.2016.11.002>
- Yustika, A. E. (2008). *Ekonomi kelembagaan: Definisi, teori, dan strategi*. Bayumedia Publishing.
- Zen, Z., Barlow, C., Gondowarsito, R., & McCarthy, J. (2016). *Interventions to promote smallholder oil palm and socio-economic improvement in Indonesia*. R. A. Cramb & J. F. McCarthy (Eds.), *The oil palm complex: Smallholders, agribusiness and the state in Indonesia and Malaysia* (pp. 78-108). Singapore: NUS Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1xz0km.8>

1.7 Technical Notes

1. R/C Ratio

R/C Ratio merupakan indikator utama untuk menilai efisiensi finansial suatu usaha pertanian. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara total penerimaan (R) dengan total biaya produksi (C). Dengan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$R/C \text{ Ratio} = R/C$$

Interpretasi:

$R/C > 1$: Usaha menguntungkan dan efisien secara finansial.

$R/C = 1$: Usaha berada pada titik impas.

$R/C < 1$: Usaha merugi dan tidak efisien.

- R adalah pendapatan kotor (*total revenue*), biasanya dihitung sebagai hasil produksi \times harga jual.
- C mencakup seluruh biaya eksplisit, baik tunai maupun imputasi (misalnya tenaga kerja keluarga, penyusutan).

2. Margin (π/R)

Margin usaha didefinisikan sebagai proporsi keuntungan (π) terhadap total penerimaan (R). Indikator ini menunjukkan berapa bagian dari pendapatan yang benar-benar menjadi keuntungan bersih setelah dikurangi seluruh biaya. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Margin} = \pi / R$$

$$\text{dengan, } \pi = R - C$$

Interpretasi:

Nilai margin yang lebih tinggi menunjukkan profitabilitas usaha yang lebih kuat. Margin dapat dibandingkan antar-kelompok petani, antarwilayah, maupun antar komoditas untuk menilai struktur biaya dan daya saing.

- Margin sensitif terhadap perubahan harga dan struktur biaya.
- Dapat digunakan untuk menganalisis kerentanan usaha terhadap volatilitas harga output dan input.

3. Break-even Price (BEP)

Break-even Price (BEP) adalah tingkat harga minimum yang harus diterima petani agar usaha tidak mengalami kerugian (pendapatan sama dengan biaya). BEP memberikan batas bawah harga jual yang menjamin kelayakan finansial usaha. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$\text{BEP} = C / Q$$

dengan Q = total produksi yang dihasilkan.

Interpretasi:

Harga jual aktual > BEP: usaha menghasilkan keuntungan

Harga jual aktual = BEP: usaha berada pada titik impas.

Harga jual aktual < BEP: usaha merugi.

- BEP dapat dihitung dalam satuan harga per kilogram atau harga per hektare tergantung kebutuhan analisis.
- Berguna untuk analisis sensitivitas ketika terjadi fluktuasi harga komoditas atau perubahan struktur biaya.

2

**Masa *Golden Age* Sebagai
Fondasi Terbentuknya
Generasi Emas di
Provinsi Jambi**

“

Seluruh rangkaian tahapan pendidikan anak merupakan proses strategis dalam menyiapkan generasi emas yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi.

”

Masa *Golden Age* Sebagai Fondasi Terbentuknya Generasi Emas di Provinsi Jambi

2.1 Generasi Emas Lahir dari Sebuah Keluarga

2.1.1 Pendidikan Prasekolah dan Keluarga

Anak merupakan aset sekaligus harapan masa depan sebuah negara. Mereka berasal dari entitas masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama yang membentuk karakter anak serta menentukan kesiapan mereka dalam menghadapi tahapan perkembangan selanjutnya, termasuk kesiapan memasuki dunia pendidikan. Proses pendidikan anak dimulai dari sejak usia dini dan berakar pada pendidikan dalam keluarga. Selanjutnya, anak melanjutkan ke pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Seluruh rangkaian tahapan tersebut merupakan proses strategis dalam menyiapkan generasi emas yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Hornby dan Lafaele (2011) menjelaskan bahwa partisipasi orangtua pada umumnya terwujud dalam bentuk dukungan pendanaan dan berbagai dukungan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak. Dengan demikian, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam pendidikan anak. Lingkungan keluarga menjadi fondasi utama dalam mempersiapkan anak untuk mampu menjalani kehidupan pada tahapan perkembangan berikutnya.

Keluarga merupakan pusat pendidikan yang paling fundamental karena memberikan pengaruh yang signifikan pada tahap awal kehidupan seorang anak. Pada periode umur 3,5–7 tahun, seorang anak sudah mulai mampu menerima informasi dan belajar melalui interaksi dengan lingkungan sekitar (Dewantara, 1989). Selain itu, perkembangan kecerdasan mencapai puncaknya pada masa keemasan (*golden age*), yaitu usia 0–6 tahun. Periode ini, merupakan usia krusial yang menjadi landasan bagi anak untuk mengembangkan keterampilan, potensi, serta kebiasaan positif yang akan berpengaruh pada tahapan perkembangan selanjutnya.

Di Indonesia, pendidikan prasekolah atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk anak usia 0–6 tahun mencakup Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), TK/RA/BA (Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal), serta Satuan PAUD Sejenis (SPS). Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program sebagai wujud komitmen dalam memperluas sekaligus menyetarakan akses masyarakat terhadap layanan PAUD. Upaya peningkatan sarana dan prasarana pun terus dilakukan guna menunjang kualitas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung program ini adalah melalui revitalisasi gedung-gedung sekolah, penyediaan serta penambahan sarana alat permainan edukatif, inisiasi program Bunda PAUD, dan penyelenggaraan pelatihan khusus bagi pendidik PAUD.

Diana dan Mesiono (2016) menerangkan bahwa keberadaan anak dalam keluarga menjadi suatu kebanggaan bagi setiap orangtua. Orang tua mempersiapkan anak sebagai generasi yang berkualitas dan berguna bagi masyarakat dan bangsa. Anak-anak tidak hanya

membutuhkan makan, minum, pakaian, tetapi juga kasih sayang dan perlindungan yang berbasis kepada kebutuhan fisik dan psikis yang mendewasakan mereka. Pendewasaan anak memerlukan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini yang terpadu, terprogram, dan komprehensif. Kesadaran ini tentu saja harus didukung oleh masyarakat dan pemerintah dalam rangka mempersiapkan manusia yang unggul dan memiliki daya saing lokal, nasional, regional, dan global. Untuk itu diperlukan kebijakan dalam program pendidikan anak usia dini baik PAUD, TK, RA, BA dan KB yang dikategorikan ke dalam pendidikan prasekolah sebagai bagian dari prioritas pendidikan nasional.

Kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak usia dini. Ketiga komponen ini memiliki peranan strategis yang saling melengkapi. Partisipasi orang tua tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, berbagai program dan kebijakan pemerintah serta dukungan masyarakat tidak akan berhasil tanpa keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak.

Dari perspektif lingkungan keluarga, orang tua merupakan aktor utama sekaligus tonggak awal pelaksanaan pendidikan anak. Pemahaman orangtua terhadap kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam mendidik anak usia dini menjadi prasyarat penting bagi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada tahap ini. Orang tua dituntut berperan aktif dalam membimbing dan mendampingi anak, baik sebelum maupun setelah proses pembelajaran berlangsung di satuan PAUD. Partisipasi orang tua sebagai faktor pendorong utama dalam keberhasilan program pendidikan anak usia dini, terutama melalui kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan di masa golden age.

2.1.2 Pendidikan Prasekolah dan Keluarga

Berbagai penelitian empiris dilakukan untuk mengidentifikasi determinan partisipasi pendidikan prasekolah di Indonesia. Yasmina dkk (2022) melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi PAUD di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 serta merumuskan intervensi kebijakan yang diperlukan untuk mengoptimalkannya. Penelitian ini menggunakan sejumlah variabel independen, yaitu kelompok pengeluaran rumah tangga, pendidikan tertinggi ibu, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, status pekerjaan ibu, dan status pekerjaan kepala rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang status pekerjaan ibu, jumlah anggota rumah tangga, dan kelompok pengeluaran rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi PAUD. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menekankan bahwa peningkatan partisipasi pendidikan prasekolah/pendidikan anak usia dini tidak dapat dicapai hanya melalui strategi sosialisasi saja, tetapi memerlukan pendekatan komprehensif antara lain peningkatan kualitas lembaga PAUD, program pemberdayaan perempuan, program keluarga berencana serta kebijakan yang meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Setiadi (2023) memperluas pemahaman mengenai determinan partisipasi pendidikan prasekolah di Pulau Sumatera tahun 2021. Latar belakang penelitian ini adalah capaian APK PAUD di seluruh provinsi di Pulau Sumatera yang berada di bawah rata-rata nasional disertai disparitas antardaerah, meskipun infrastruktur layanan prasekolah telah tersedia secara relatif memadai. Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin anak, usia anak, klasifikasi wilayah tempat tinggal, jumlah anggota rumah tangga, kelompok pengeluaran rumah tangga, pendidikan tertinggi ibu, status bekerja ibu, dan rasio pendidik per 100 anak usia 3–6 tahun memberikan pengaruh signifikan terhadap status partisipasi pendidikan prasekolah. Temuan ini menguatkan bahwa partisipasi PAUD dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik anak, kondisi rumah tangga,

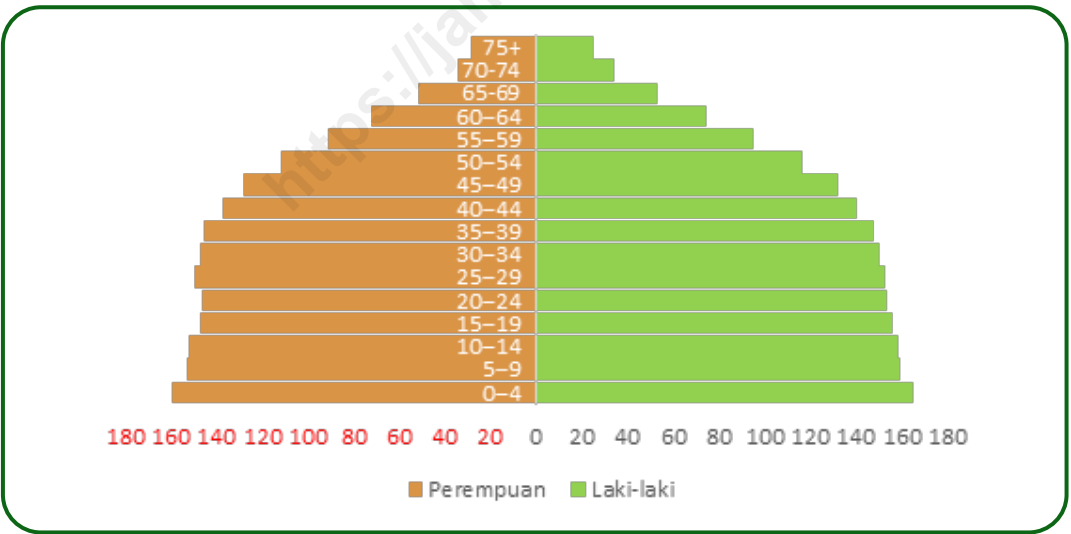
faktor sosial ekonomi, serta aspek ketersediaan layanan pendidikan.

Selanjutnya Handajany dkk (2021) meneliti pengaruh pendidikan dan status pekerjaan ibu terhadap keputusan orang tua dalam mendaftarkan anak ke pendidikan prasekolah di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu berbanding lurus dengan peluang anak mengikuti pendidikan prasekolah; ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung akan meningkatkan kepedulian terhadap perkembangan anak pada masa golden age dibandingkan dengan pendidikan SD ke bawah. Selain itu, status pekerjaan ibu juga menunjukkan pengaruh positif, di mana ibu yang bekerja cenderung memperbesar peluang anak untuk mengikuti pendidikan prasekolah dibandingkan anak dari ibu yang tidak bekerja. Temuan ini menegaskan pentingnya peran ibu sebagai agen utama dalam pengambilan keputusan pendidikan anak, serta implikasinya terhadap kebijakan pendidikan dan pemberdayaan perempuan.

2.2 Generasi Emas Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah

2.2.1 Pendidikan Prasekolah dan Keluarga

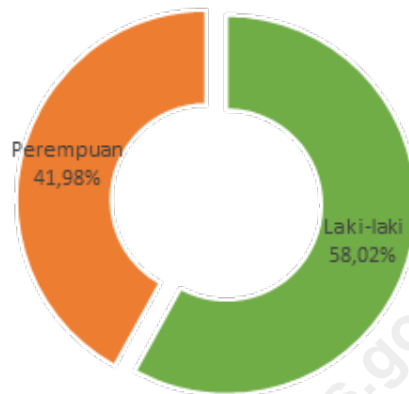
Provinsi Jambi, yang dikenal sebagai negeri ‘Sepucuk Jambi Sembilan Lurah’, terbentang luas 49 ribu km², mulai dari ujung jabung hingga pegunungan bukit barisan. Berdasarkan hasil proyeksi *longform* sensus penduduk 2020 (LFSP2020), jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2024 mencapai 3,72 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 76 jiwa per km². Kekuatan demografi Provinsi Jambi didorong oleh besarnya proporsi penduduk usia muda atau usia produktif, yaitu 68,94 persen dari total jumlah penduduk, dengan rasio ketergantungan 45,06.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Hasil Proyeksi LFSP2020

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Jambi, 2024

Dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2024 sebesar 1,30 persen, lebih rendah dari tahun 2023 yang sebesar 1,33 persen, menunjukkan bahwa pemerintah berhasil mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk. Namun demikian, piramida penduduk Provinsi Jambi masih didominasi oleh penduduk kelompok usia 0–4 tahun, yang mengindikasikan tingginya tingkat kelahiran atau potensi migrasi anak. Besarnya jumlah penduduk usia anak ini perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengingat anak merupakan penerus estafet pembangunan di masa depan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Hasil Proyeksi LFSP2020

Gambar 2.2 Penduduk Usia 0–6 tahun Berdasarkan Jenis Kelamin, 2024

Penduduk usia 0–6 tahun di Provinsi Jambi didominasi oleh laki-laki sebesar 58,02 persen, sementara perempuan sebesar 41,98 persen. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi pendidikan prasekolah, dimana partisipasi penduduk laki-laki usia 0–6 tahun lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Partisipasi penduduk laki-laki usia 0–6 tahun dalam pendidikan prasekolah tercatat sebesar 26,50 persen, yang terdiri dari 19,79 persen masih mengikuti pendidikan prasekolah dan 6,71 persen pernah mengikuti pendidikan sekolah. Sementara itu, partisipasi penduduk perempuan usia 0–6 tahun mencapai 27,70 persen, dimana 18,14 persen masih mengikuti pendidikan prasekolah dan 9,56 persen pernah mengikuti pendidikan prasekolah.



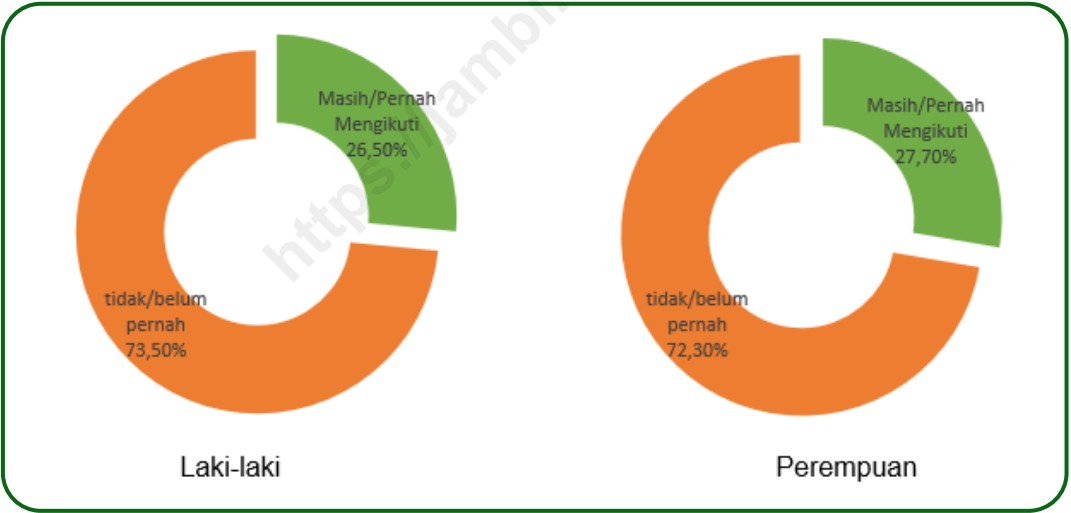
Potensi penduduk anak 0–4 tahun perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengingat anak merupakan penerus estafet pembangunan di masa depan .

Tabel 2.1 Partisipasi Pendidikan Prasekolah Penduduk Usia 0–6 Tahun di Provinsi Jambi, 2024

Jenis Kelamin	Partisipasi Prasekolah Penduduk Usia 0–6 Tahun			Total
	Masih Mengikuti	Pernah Mengikuti	Tidak/Belum Pernah Mengikuti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	19,79	6,71	73,50	100,00
Perempuan	18,14	9,56	72,30	100,00
Total	8,98	8,10	72,91	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Penduduk usia 0–6 tahun di Provinsi Jambi pada tahun 2024 yang tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah yaitu sebesar 72,91 persen. Artinya, tiga dari empat anak usia dini di Provinsi Jambi belum pernah tersentuh layanan pendidikan prasekolah. Berdasarkan Gambar 2.3 diketahui bahwa proporsi penduduk laki-laki usia 0–6 tahun yang tidak/ belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Penduduk laki-laki usia 0–6 tahun yang tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah mencapai 73,50 persen dan perempuan sebesar 72,30 persen.



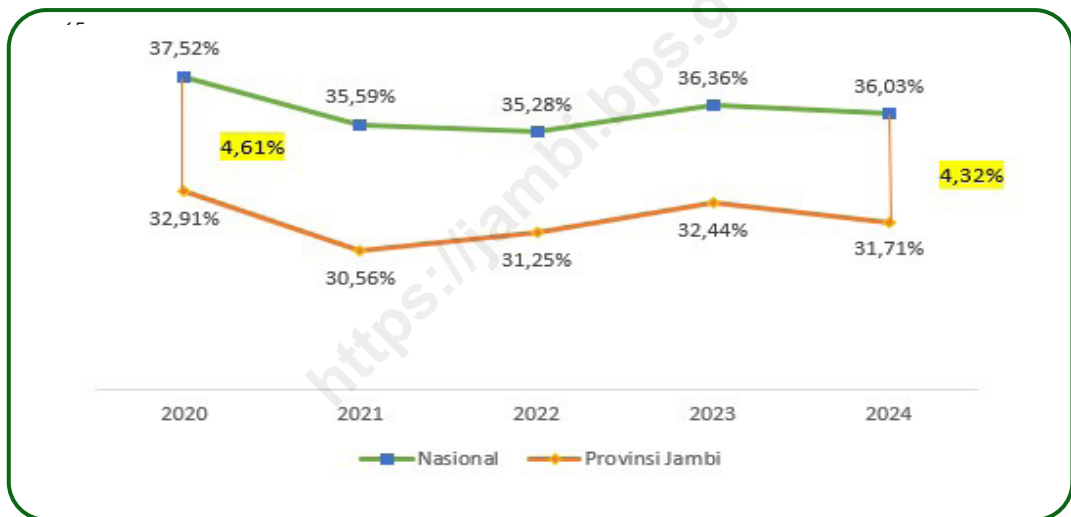
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 2.3 Partisipasi Penduduk Usia 0–6 Tahun terhadap Pendidikan Prasekolah Berdasarkan Jenis Kelamin, 2024

2.2.1 Akses Pendidikan Prasekolah di Provinsi Jambi

Pendidikan prasekolah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan dan perkembangan anak. Melalui pendidikan prasekolah diharapkan anak memiliki kesiapan yang lebih baik untuk memasuki jenjang pendidikan formal. Meskipun demikian, hingga saat ini baru sekitar 27,70 persen anak usia 0–6 tahun di Provinsi Jambi yang telah mengikuti pendidikan prasekolah. Hal ini berarti bahwa satu dari empat anak usia 06 tahun di Provinsi Jambi sedang/pernah menempuh pendidikan prasekolah. Masih banyaknya anak usia dini yang belum mengakses pendidikan prasekolah dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak usia serta terbatasnya akses layanan PAUD di beberapa wilayah (BPS Provinsi Jambi, 2024).

Ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi prasekolah adalah Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD). APK PAUD juga dapat menilai keberhasilan program pemerintah dalam memperluas akses terhadap pendidikan prasekolah yang inklusif dan berkualitas. Indikator ini dihitung dari perbandingan penduduk usia 0–6 tahun yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah dengan jumlah penduduk usia 3–6 tahun. Satuan pendidikan yang digunakan dalam perhitungan hanya pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, sehingga Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) tidak termasuk dalam kategori pendidikan prasekolah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 2.4 Capaian APK PAUD Nasional dan Provinsi Jambi, 2020–2024

Tren penurunan APK PAUD selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pembangunan manusia sejak dini tidak bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan Gambar 2.4, capaian APK PAUD periode 2020–2024 baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Jambi cenderung penurunan. Secara nasional, APK PAUD turun dari 37,52 persen pada tahun 2020 menjadi 36,03 persen pada tahun 2024. Sementara itu, capaian APK PAUD Provinsi Jambi mengalami penurunan dari 32,91 persen pada tahun 2020 menjadi 31,71 persen pada tahun 2024.

Jika dilihat dari perkembangan selama lima tahun terakhir, Provinsi Jambi mampu mempersempit *gap* antara APK PAUD Provinsi dan APK PAUD nasional. Untuk mencapai “zero gap”, Provinsi Jambi pada tahun 2020 harus meningkatkan capaian APK PAUD sebesar 4,61 persen. Kemudian, pada tahun 2024 *gap* tersebut semakin menyempit menjadi 4,32 persen. Keberhasilan Provinsi Jambi dalam menekan perbedaan capaian APK PAUD dengan tingkat nasional menunjukkan konsistensi dan komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini. Diperlukan program yang berkelanjutan tidak hanya untuk meningkatkan APK PAUD, tetapi juga untuk mencapai “zero gap”, bahkan berpotensi melampaui capaian nasional.

Tabel 2.2 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Pendidikan Prasekolah di Provinsi Jambi, Tahun Ajaran 2023/2024

Tahun Ajaran	TK (Sederajat)	KB (Sederajat)	TPA	SPS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sekolah	1.747	1.817	62	187	3.813
Guru	5.635	3.869	152	391	10.047
Murid	63.559	58.116	1.494	6.447	129.616

Catatan: Data semester ganjil tahun ajaran 2023/2024
Sumber: www.kemendikdasmen.go.id dan Badan Pusat Statistik, Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Jambi Dalam Angka 2025

Akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan juga memegang peranan penting dalam meningkatkan partisipasi prasekolah. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa jumlah satuan pendidikan prasekolah di Provinsi Jambi pada tahun ajaran 2023/2024 tercatat sebanyak 3.813 satuan pendidikan yang terdiri dari 1.747 TK/ sederajat, 1.817 KB/ sederajat, 62 TPA,

dan 187 SPS. Pada periode yang sama, jumlah guru pendidikan prasekolah di Provinsi Jambi mencapai 10.047 orang. Jumlah terbesar merupakan guru TK/ sederajat sebanyak 5.635 orang, disusul guru KB/ sederajat sebanyak 3.869 orang. Sementara itu, jumlah guru pada satuan pendidikan yang termasuk dalam perhitungan APK PAUD, yaitu TPA dan SPS masing-masing berjumlah 152 orang dan 391 orang pada tahun ajaran 2023/2024. Jumlah peserta didik terbanyak berada pada satuan pendidikan TK/ sederajat mencapai 63.559 orang dan diikuti oleh KB/ sederajat sebanyak 58.116 orang.



Keberhasilan Provinsi Jambi dalam menekan perbedaan capaian APK PAUD dengan tingkat nasional menunjukkan konsistensi dan komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini

Tabel 2.3 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Pendidikan Prasekolah di Provinsi Jambi, Tahun Ajaran 2023/2024

Uraian	Tahun Ajaran 2022/2023	Tahun Ajaran 2023/2024
(1)	(2)	(3)
Sekolah	1.920	1.934
Guru	5.870	6.026
Murid	68.378	70.006
Rasio Murid:Guru	1:12	1:12

Catatan: Data semester ganjil

Sumber: www.kemendikdasmen.go.id dan Badan Pusat Statistik, Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Jambi Dalam Angka 2025

Tabel 2.3 menunjukkan terdapat peningkatan jumlah sekolah, guru, dan peserta didik pada tahun ajaran 2023/2024. Jumlah satuan pendidikan meningkat sebanyak 14 sekolah, jumlah guru bertambah sebanyak 156 orang, dan jumlah peserta didik bertambah sebanyak 1.628 orang dibandingkan dengan tahun ajaran 2022/2023. Rasio peserta didik terhadap guru pada satuan pendidikan TK/ sederajat di Provinsi Jambi pada tahun ajaran 2023/2024 adalah 1:12. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Pemendikbud) Nomor 137 tahun 2014, rasio ideal peserta didik terhadap guru dalam layanan PAUD adalah 1:15. Dengan demikian, dari sisi kualitas pembelajaran, Provinsi Jambi telah memenuhi standar rasio ideal. Namun optimalisasi tetap harus dilakukan agar layanan PAUD menjadi lebih efektif dan efisien.

2.3 Menilik Harapan Membangun Generasi Emas

2.3.1 Upaya Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Prasekolah

Salah satu sasaran utama dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2025–2029 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sasaran ini diimplementasikan melalui berbagai program pemerintah termasuk program wajib belajar 13 tahun yang mencakup 1 (satu) tahun pendidikan prasekolah. Pendidikan wajib belajar prasekolah menjadi sangat penting karena berperan sebagai fondasi dalam peningkatan kualitas manusia, sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 mendefinisikan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Warga negara memiliki hak akses yang sama untuk menikmati layanan pendidikan yang bermutu dan disebutkan juga bahwa setiap orang tua berhak memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pada tahun 2024, kurikulum pendidikan PAUD telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum merdeka menggantikan Permendikbud Nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013. Kurikulum PAUD mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum belajar yang akan diimplementasikan pada pendidikan anak usia dini baik formal maupun nonformal. Pemerintah terus berupaya menyempurnakan kurikulum yang digunakan dan diharapkan dapat membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani anak sehingga mereka siap memasuki pendidikan lanjut.

Pemerintah provinsi Jambi mendukung penguatan pendidikan anak usia dini dengan mengacu pada RPJMN 2025–2029 serta Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu wujud konkret dari komitmen tersebut adalah pelaksanaan Program Jambi Pro PAUD yang dirancang untuk meningkatkan angka partisipasi PAUD, memperkuat aspek perkembangan dan keceriaan anak, serta memperluas pemerataan akses pendidikan anak hingga ke wilayah terpencil. Implementasi program ini antara lain melalui pembentukan Bunda PAUD di Provinsi hingga kabupaten/kota. Bunda PAUD berperan sebagai penggerak sosial yang bersifat sukarela dan berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mendorong penyediaan layanan PAUD yang optimal, inklusif, dan bermutu.

Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya memperluas akses PAUD hingga ke komunitas Suku Anak Dalam (SAD), melakukan sosialisasi dan advokasi terkait implementasi transisi PAUD ke jenjang pendidikan dasar, memperkuat penyediaan PAUD negeri di setiap kecamatan, serta meningkatkan kompetensi guru dan penyelenggara PAUD. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap anak di Jambi memperoleh layanan pendidikan usia dini yang setara dan berkualitas.



Program wajib belajar 13 tahun meliputi 12 tahun sekolah dasar dan menengah serta 1 (satu) tahun pendidikan anak usia dini

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pendidikan Prasekolah dari Perspektif Keluarga

Partisipasi anak dalam pendidikan prasekolah tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan layanan pendidikan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang berasal dari lingkungan keluarga. Kajian ini menggunakan analisis regresi logistik biner untuk mengidentifikasi peran keluarga terhadap tingkat partisipasi pendidikan prasekolah. Data yang digunakan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 sehingga pendekatan yang digunakan adalah rumah tangga. Unit analisis penelitian adalah penduduk usia 0–6 tahun yang tinggal bersama dengan ibu kandung pada rumah tangga sampel.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi prasekolah penduduk usia 0–6 tahun di Provinsi Jambi adalah karakteristik tempat tinggal yaitu variabel status wilayah tempat tinggal serta karakteristik rumah tangga yaitu variabel jumlah anggota rumah tangga, status bekerja ibu, dan kelompok pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan uji kecocokan model, diperoleh nilai Hosmer-Lemeshow sebesar 11,606 dengan $prob=0,170$. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai prediksi dan nilai observasi sehingga model yang dihasilkan *fit* (sesuai) untuk menjelaskan variasi partisipasi pendidikan prasekolah pada penduduk 0–6 tahun.

Variabel ukuran jumlah anggota rumah tangga merupakan salah satu karakteristik rumah tangga yang mempengaruhi partisipasi prasekolah anak di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan anak yang tinggal pada rumah tangga yang berukuran sedang (4–6 orang) memiliki peluang mengikuti pendidikan prasekolah 0,777 kali lebih kecil dibandingkan dengan rumah tangga yang berukuran kecil (<4 orang). Dengan kata lain, semakin besar ukuran rumah tangga maka akan semakin kecil peluang seorang anak untuk mengikuti pendidikan prasekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian Yasmina dkk (2022) serta Nugroho dan Setiadi (2023) yang menjelaskan bahwa semakin kecil jumlah anggota rumah tangga maka akan semakin besar kemungkinan anak untuk mendapatkan akses pendidikan sesuai kebutuhannya.

Karakteristik rumah tangga yang juga mempengaruhi partisipasi prasekolah di Provinsi Jambi adalah status ibu bekerja. Anak dengan ibu yang bekerja memiliki peluang 1,500 kali lebih besar untuk mengikuti pendidikan prasekolah dibandingkan dengan anak dengan ibu yang tidak bekerja. Hal ini sejalan dengan penelitian Yasmina dkk (2022), Nugroho dan Setiadi (2023), dan Handajany dkk (2021) yang menyatakan bahwa anak dengan ibu yang bekerja memiliki peluang lebih besar untuk mengikuti pendidikan prasekolah dibandingkan dengan anak dengan ibu yang tidak bekerja. Ibu bekerja bertujuan untuk membantu menambah penghasilan rumah tangga, dengan pendapatan tersebut maka rumah tangga memiliki tambahan penghasilan sehingga kemungkinan anggota rumah tangga untuk mengikuti pendidikan prasekolah akan semakin besar.

Pengeluaran rumah tangga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi pendidikan prasekolah di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran rumah tangga kuintil 2 memiliki peluang 1,093 kali lebih besar untuk mengikuti pendidikan prasekolah dibandingkan dengan kelompok pengeluaran kuintil 1. Semakin tinggi kelompok pengeluaran maka akan semakin besar kemungkinan seorang anak untuk mengikuti pendidikan prasekolah yang sejalan dengan penelitian Yasmina dkk (2022) serta Nugroho dan Setiadi (2023). Hasil kedua penelitian ini menyatakan bahwa pendidikan yang berkualitas membutuhkan dukungan sistem perekonomian keluarga yang baik. Pendidikan yang bermutu memerlukan biaya tertentu yang hanya dapat dipenuhi jika perekonomian rumah tangga kuat. Selain itu menurut OECD (2025) juga menjelaskan bahwa di Indonesia, investasi pendidikan anak usia dini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu terdapat kesenjangan pendidikan antara keluarga kaya dan miskin dalam hal akses dan kualitas penyediaan pendidikan anak usia dini.

2.4 Kesimpulan dan Saran

1. Pendidikan prasekolah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Tahap ini merupakan fondasi penting dalam pembentukan kognitif, sosial, emosional, serta karakter anak.
2. Provinsi Jambi telah memenuhi standar rasio ideal pembelajaran pendidikan prasekolah namun tetap diperlukan optimalisasi agar layanan PAUD menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Pemerintah perlu melaksanakan berbagai program dan inisiatif secara lebih masif untuk meningkatkan partisipasi prasekolah di Provinsi Jambi, tidak hanya melalui sosialisasi dan advokasi tetapi juga program pemerataan akses layanan pendidikan prasekolah.
4. Dari perspektif keluarga, faktor ukuran rumah tangga; status bekerja ibu; serta kelompok pengeluaran rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap partisipasi

anak dalam pendidikan prasekolah. Hal ini menegaskan bahwa perlu adanya upaya pemberdayaan perempuan khususnya peningkatan keterampilan, kesempatan kerja, dan akses terhadap sumber daya ekonomi agar ibu dapat lebih optimal dalam mendukung pendidikan anak. Selain itu juga diperlukan bantuan biaya pendidikan dan percepatan pelaksanaan program 'satu kecamatan satu TK Negeri' yang memberikan gratis penuh terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

2.5 Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, 2023. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-20250 Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2024. *Statistik Pendidikan 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- , 2025. *Statistik Kesejahteraan 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2025. *Jambi Dalam Angka 2025*. Jambi: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- , 2025. *Statistik Pendidikan Provinsi Jambi 2024*. 2025. Jambi: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2025. *Profil Penduduk Anak Provinsi Jambi 2024*. Jambi: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Dewantara, Ki Hajar. 1989. *Seri Biografi dan Kesejarahan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Diana, Nirva dan Mesiono. 2016. *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkeunggulan)*. Medan: Perdana Publishing.
- Handajany, dkk. 2021. "Dampak Pendidikan dan Status Bekerja Ibu terhadap Pengambilan Keputusan Prasekolah Anak di Jawa Barat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10, No.3 (Desember 2021). Bandung: LPPM Universitas Pendidikan Ganesha.
- Hornby, G. dan Raylee Lafaele. 2011. "Barriers to Parental Involvement in Education: An Explanatory Model." New Zealand: College of education-University of Canterbury.
- Gujarati, D.N. and Dawn C. Porter. (2009). *Basic Econometrics. 5th edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin companies.
- Guntara, Mohammad dan Femi Dwi Astuti. 2025. "Komparasi Kinerja Label-Encoding dengan One-Hot-Encoding pada algoritma K-Nearest Neighbor menggunakan Himpunan Data Campuran (Studi Kasus: Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana." *Jurnal Informatika dan Komputer*, 9(2), 352–360, <https://doi.org/10.26798/jiko.v9i2.1605>.
- Nugroho, Guntur dan Yaya Setiadi. 2023. "Variabel-variabel yang Memengaruhi Status Partisipasi Pendidikan Prasekolah di Pulau Sumatera Tahun 2021". *Seminar Nasional Official Statistics 2023* (1), 309-320.
- OECD. 2020. *Education in Indonesia: Rising to the Challenge*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0c76f120-en>.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Pemendikbud) Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Pemerintah

Republik Indonesia. Disahkan pada 31 Oktober 2023.

Pemerintah Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Disahkan pada 31 Oktober 2023.

Pemerintah Indonesia. 2025. *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*. Jakarta: Kementerian Sekretaris Utama.

Yasmina, dkk. 2022. "Analisis Pendidikan Prasekolah di Provinsi Sumatera Barat. LPPM UMSB 16, No.2 (Juli 2022). Padang: LPPM UMSB.

Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. 2025. *Peran Bunda PAUD*. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Diakses pada 17 November 2025 pada www.kemendikdasmen.go.id.

2.6 Lampiran

Lampiran 2.1 Variabel dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian (1)	Definisi Operasional (2)
Partisipasi PAUD (variabel dependen)	Penduduk umur 0-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah jenjang Formal <ul style="list-style-type: none">• Sedang/pernah mengikuti• Tidak pernah mengikuti
Ukuran rumah tangga	Jumlah anggota rumah tangga <ul style="list-style-type: none">• Kecil (<4 orang)• Sedang (4-6 orang)• Besar (≥6 orang)
Status bekerja ibu	Partisipasi ibu dalam menambah penghasilan rumah tangga <ul style="list-style-type: none">• Bekerja• Tidak bekerja
Pendidikan tertinggi ibu	Pendidikan tertinggi yang dimiliki ibu dilihat dari kepemilikan ijazah tertinggi <ul style="list-style-type: none">• Tidak memiliki ijazah• Tamat SD/ sederajat• Tamat SMP/ sederajat• Tamat SMA/ sederajat• Tamat Perguruan Tinggi
Kelompok pengeluaran rumah tangga	Pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan <ul style="list-style-type: none">• Kuintil 1: <Rp769.477• Kuintil 2: Rp769.477-Rp954.837• Kuintil 3: Rp954.837-Rp1.184.930• Kuintil 4: Rp1.184.930-Rp1.590.033• Kuintil 5: ≥Rp1.590.033
Kategori wilayah	Kategori wilayah <ul style="list-style-type: none">• Perkotaan• Perdesaan

Lampiran 2.2 Hasil Estimasi Model Regresi Logistik Biner

Variabel Penelitian		Koefisien	Prob	Odds
(1)		(2)	(3)	(4)
Ukuran rumah tangga	Ukuran_encoded Referensi: <4 orang	-0,252	0,000	0,777
Status bekerja ibu	Status Bekerja	0,405	0,000	1,500
Pendidikan tertinggi ibu	Pendidikan tertinggi_encoded Referensi: tidak memiliki ijazah	-0,068	0,142	0,934
Kelompok pengeluaran rumah tangga	Kelompok pengeluaran_encoded Referensi: kuintil 1	0,089	0,010	1,093
Kategori wilayah	Status wilayah	0,264	0,013	1,302
Hosmer-Lemeshow		11,606 (P-value = 0,170)		

Catatan: Variabel telah melalui proses pengodean (label *encoding* untuk variabel bertipe ordinal dan *One-Hot-Encoding* untuk variabel nominal)



**SENSUS
EKONOMI
2026**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**

Jl. A. Yani No. 4 Telanaipura, Jambi 36122 Telp. 0741-60497
Homepage: <https://www.jambi.bps.go.id>
Email: bps1500@bps.go.id